

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL		1721-B1
	H.1 NOMOR :	<div>2000001243</div>	H.4 <input checked="" type="checkbox"/> Final
	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-	<div>0</div>	H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan
			H.5 <input type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP :	<div>154838544722000</div>
A.2 NIK :	<div></div>
A.3 Nama :	<div>HARDIANTO</div>

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
4	21-402-01	9.990.000	9.990.000	<div>0</div>	5	499.500

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota

B.8 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	<div>02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022</div>				
	Nama Dokumen	<div>Biaya Pembayaran</div>	Tanggal	<div>04</div>	<div>04</div>	<div>2022</div>


B.9 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.						
Nomor :	<div></div>	Tanggal	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>

B.10 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	<div></div>
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

B.11 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :	<div></div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah :	<div>953350162722000</div>
C.2 Nama Instansi Pemerintah :	<div>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</div>
C.3 ID Subunit Organisasi :	<div></div>
C.4 Tanggal :	<div>04</div> <div>04</div> <div>2022</div>
C.5 Nama Penandatanganan :	<div>RIANDY</div>
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :	<div>Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.</div>



YHVN1RV6

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.